

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia ini yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman tersebut menjadi keniscayaan yang tidak terbantahkan serta menjadi berkah yang tak ternilai. Keanekaragaman ini dapat menjadi pisau bermata dua, di satu sisi keragaman tersebut menjadi modal awal yang kuat memperkaya khazanah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi yang lain keragaman ini menjadi sumber konflik yang subur, jika di antara unsur bangsa tidak memiliki kesadaran yang tinggi untuk menciptakan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bernegara.

Menurut Dadang Kahmad, keragaman bangsa Indonesia secara geografis memiliki lebih dari 13 ribu gugusan pulau, dalam setiap pulau dihuni oleh multi suku, multi budaya, multi bahasa dan multi agama. Di Indonesia setidaknya terdapat 250 kelompok suku bangsa dan lebih dari 250 bahasa lokal (*lingua franca*), 6 agama resmi yang diakui oleh hukum Indonesia maupun agama yang tidak resmi yang menyatu dalam Bhineka Tunggal Ika.¹

Indonesia bukanlah negara agama sekalipun agama menjadi unsur penting dalam masalah kenegaraan. Indonesia juga bukan negara sekuler karena warga negara Indonesia harus memiliki agama yang telah disahkan oleh Negara. Agama memiliki kemampuan yang kuat mengikat pemeluknya. Orang yang beragama akan merasa memiliki identitas tersendiri, dan menjadi kebanggaan. Hal ini berawal munculnya kelompok yang bersedia menjadikan agama sebagai tumpuan segala sesuatu, bahkan apa yang dipesankan agama, sekalipun itu hanya tafsir seorang tokoh atau pemimpin agama, akan dijalankan karena memberikan identitas diri yang dahsyat.² Identitas diri karena keagamaan ini tidak jarang menyebabkan munculnya semangat sektarian, semangat parokial dan semangat

¹ Dadang Kahmad, *Multikulturalisme, Islam, dan Media, Respon Ormas Islam dan Peran Buletin Jumat Menyebarkan Gagasan Multikulturalisme*, (Bandung: Pustaka Djati, 2013), 8

² Zuly Qodir, *Sosiologi Agama Esai-Esai Agama di Ruang Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 231

mati demi agama. Kekuatan doktrinal agama belum dapat dilawan oleh ideologi apapun.³ Agama yang memiliki unsur sistem kepercayaan (*faith/belief system*), kepemimpinan (*leader/teacher*), Kitab suci (*Teks*) jamaah (*ummah*) dan peribadatan (ritual), telah menjadi daya ikat dan daya dorong dalam masyarakat yang tidak terbantahkan eksistensinya.⁴ Kekuatan identitas yang dimiliki oleh agama, terkadang membuat pemeluknya rela melakukan tindakan-tindakan apa saja untuk membela kepercayaan dan agamanya dari gangguan atau hinaan orang terhadap agamanya tersebut.

Berdasarkan fakta dan realitas yang terjadi, kerukunan umat beragama tidak bersifat *taken for granted*. Kerukunan itu harus ditumbuhkan melalui penyadaran perilaku kehidupan sehari-hari. Kerukunan umat beragama yang sangat majemuk dapat ditingkatkan melalui upaya pemerintah dalam menciptakan pendidikan maupun penyadaran dari masyarakat itu sendiri.⁵ Penyadaran terhadap kerukunan beragama dapat ditata melalui pembiasaan-pembiasaan yang mampu menumbuhkan perilaku hidup rukun semenjak dini, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sebenarnya telah memiliki potensi yang besar untuk menumbuh kembangkan perilaku hidup rukun antar sesama anggota masyarakat, karena kehidupan sosial kemasyarakatan mendapat perhatian yang besar dalam ajaran agama Islam. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan sosial, hal tersebut tercermin dari ajaran Islam seperti anjuran shodaqoh, anjuran berinfaq, serta keutamaan sholat berjamaah yang semua kegiatan tersebut melibatkan interaksi anggota masyarakat.

Mohammad Hatta sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid, menyatakan bahwa keadilan yang digaungkan dalam agama Islam yaitu keadilan sosial hanya dapat dirasakan jika umat manusia bebas dari segala tekanan.

³ Sejarah telah mencatat berbagai macam ideologi yang besar namun akhirnya runtuh ditinggalkan penganutnya. Kasus ideologi komunis misalnya, ideologi ini dulu banyak digunakan oleh banyak Negara seperti Negara Tiongkok, Rusia dan sebagian Negara di Eropa, namun dewasa ini, ideologi ini mengalami mati suri.

⁴ Qodir, *Sosiologi Agama*, 231

⁵ Tarmizi Taher, *Agama dalam Transformasi Bangsa Membumikan Ajaran Ketuhanan*, (Jakarta: Hikmah, 2003), 38

Dikarenakan persaudaraan dan kehidupan yang saling menolong hanya dapat dirasakan dalam kehidupan sosial, maka para pemimpin Islam merasakan bahwa adalah misi Islam untuk membangun sebuah masyarakat sosialis di Indonesia.⁶

Pluralitas agama serta pengaturan kehidupan pemeluknya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Catatan sejarah menorehkan tinta emas, bagaimana Rasul Allah telah membangun keharmonisan hidup bersama dengan pemeluk agama yang berbeda ketika di Madinah. Pada masa awal kehidupan di Madinah, Rasul Allah dan para sahabat mempraktekkan hidup rukun berdampingan dengan komunitas Yahudi dan Nasrani. Hal ini menunjukkan bahwa antara pemeluk agama yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan dengan saling menerima dan menghormati eksistensi masing-masing. Hubungan ini terutama berlangsung dengan kalangan ahli kitab.⁷ Meskipun terkadang terjadi gesekan-gesekan antar golongan, namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan bermusyawarah. Jalan perang ditempuh oleh Rasul semata-mata untuk melindungi eksistensi kaum muslim yang masih sangat lemah, karena jumlahnya yang kalah jauh dibandingkan golongan Yahudi dan Nasrani. Bahkan sepeninggal Rasul, penjagaan eksistensi kaum muslimin tetap berlangsung dengan mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai bentuk sikap saling menghargai agama dan kepercayaan yang berbeda, Rasul telah meneguhkan sikap tersebut yang tertuang dalam Konstitusi Madinah. Kaum muslimin dari golongan Quraisy dan dari Yatsrib dan siapapun yang berjihad bersama kedua golongan adalah satu umat. Semua kaum muslim meskipun berbeda-beda suku membayar “*aql*” dan menebus para tawanan dengan cara yang makruf dan adil. Demikian juga berlaku bagi kaum Yahudi harus mengeluarkan belanja bersama-sama kaum muslimin selama mereka masih dalam kondisi perang. Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum muslimin. Bagi Orang Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka.

⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995),25

⁷ Taher, *Agama dalam Transformasi*, 47

Penanaman sikap persamaan dan egaliter sebagaimana dalam Piagam Madinah tersebut, terlihat jelas bahwasanya Islam membuka pintu seluas-luasnya bagi pemeluknya untuk mengadakan muamalah, menjalin hubungan sosial kemasyarakatan baik jalinan tersebut kepada sesama kaum muslimin, maupun dengan non muslim, baik satu suku maupun yang berbeda suku.

Sikap santun dan bermartabat tetap diperlihatkan oleh umat Islam pada peristiwa penaklukan Islam atas wilayah-wilayah di luar Semenanjung Jazirah Arab. Peristiwa ini dicatat dalam sejarah sebagai penaklukan yang beradab. Bahkan penakluk berperan sebagai pembangun bukan sebagai perusak.⁸ Mereka mengambil alih wilayah-wilayah yang ditaklukkan dan mengganti para penguasa lokal, namun tetap mempertahankan kebudayaan mereka serta memberi kebebasan penduduknya untuk tetap memeluk agama mereka. Sikap fleksibel dan penuh toleransi yang ditunjukkan oleh tentara Islam telah menarik perhatian penduduk dari negeri-negeri yang ditaklukkan.⁹

Dalam perspektif Islam dasar-dasar hidup untuk bermasyarakat yang pluralistik secara religious, sudah dibangun di atas landasan normatif dan historis sedari awal. Manakala terdapat hambatan dalam pelaksanaannya menurut Amin Abdullah yang dikutip Tarmizi Taher, penyebab utamanya bukan karena ajaran Islam yang bersifat intoleran dan eksklusif, namun banyak disebabkan dan dikondisikan oleh situasi historis, ekonomis-politis yang melingkari komunitas umat. Secara historis, hubungan antar umat beragama memang lebih diwarnai oleh kompetisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi, kekuasaan politik dan hegemoni kekuasaan.¹⁰ Kompetisi ini berlanjut pada identitas kelompok, yang mau tidak mau akan menyentuh sisi keagamaan. Misalnya pergumulan rakyat Nusantara menghadapi bangsa penjajah seperti Belanda, menjadi contoh konkrit bagaimana agama mewarnai pola-pola perjuangan dalam menghimpun kekuatan.

Diskursus tentang agama, sarat dengan muatan emosi, kecenderungan dan subjektivitas individu. Agama memiliki ajaran ideal dan cita-cita yang sangat

⁸ John L. Esposito, *Islam The Straight Path* alih bahasa Arif Mahtuhin, *Islam Warna-Warni Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus Al-Shirat al Mustaqim*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 45

⁹ Esposito, *Islam The Straight Path* 45

¹⁰ Taher, *Agama dalam Transformasi Bangsa*, 48

tinggi. Pemeluk fanatik agama, memandang agama sebagai benda suci, sakral, angker dan keramat, ia selalu menawarkan jampi-jampi keselamatan, kebahagiaan dan keadilan. Namun terkadang kenyataan berbeda dengan idealitas, tidak sedikit kasus yang menjadikan agama sebagai sumber konflik yang melahirkan permusuhan dan pertengkaran. Menurut Tarmizi Taher, fenomena ini setidaknya dilatarbelakangi oleh beberapa fenomena.¹¹

Pertama, pendewaan agama. Manusia sering terjerumus untuk mendewakan agama, istilah-istilah agama dan pemuka agama. Tuhan beserta sifat yang melekat pada Nya acapkali hilang. Demikian juga ajaran suci dan prinsip-prinsip agama nyaris habis, yang tinggal hanya jargon-jargon tak bernyali. Agama telah beralih fungsi. Agama tak lagi menjadi amalan yang memberi manfaat bagi pemeluk dan lingkungannya. Muncul manipulasi agama dan korupsi agama.

Kedua, pengelasan dalam berakhlak. Umat beragama sering terjebak untuk lebih dekat kepada saudara-saudara seagama (*in group feeling*) dan memomorduakan persahabatan dengan rekan dari agama lain. Keadaan ini akan mengurangi sikap objektivitas kelompok di luar dirinya lalu melahirkan sikap primordialisme yang sempit.

Ketiga, monopoli kebenaran. Kebanyakan agama mengajarkan kebenaran absolut kepada pemeluknya. Memberikan doktrin-doktrin keabsolutan kebenaran agama memang merupakan kewajaran dan sebuah kebebasan. Hanya saja, kewajaran dan kebebasan ini akan menjadi bumerang manakala tidak dibarengi dengan dorongan untuk menghargai doktrin orang lain yang berbeda. Yang terjadi selama ini adalah penyampaian doktrin kepada pemeluk agama dengan menyebarkan doktrin mereka yang paling benar sedang doktrin agama yang lain salah.

Pemahaman agama yang kaku akan menjadi sumber terorisme apabila tindakan teror merupakan perwujudan dari perintah Tuhan, baik secara langsung atau tidak sebagai persyaratan dalam bentuk-bentuk ritual. Secara langsung tidak ada dalil (Teks) agama yang menyatakan tentang teror, banyak interpretasi tentang teks keagamaan seperti jihad dalam Islam serta perang atas nama Jesus

¹¹ Taher, *Agama dalam Transformasi Bangsa*, 43-44

dalam Kristen. Jika dilihat lebih jauh, dapat dinyatakan bahwa agama bukan menjadi penyebab, tetapi sebagai pembeda atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kekerasan, ancaman bahkan pembunuhan terhadap orang lain. Agama dalam banyak tempat dijadikan sebagai justifikasi atas perilaku yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang tidak puas dengan keadaan yang terjadi.¹²

Kemajemukan agama serta berbagai perbedaan latar belakang suatu komunitas, terkadang menimbulkan berbagai persoalan yang memicu ketegangan, permusuhan bahkan konflik. Bahkan munculnya konflik ini terkadang bukan hanya disebabkan adanya beda agama atau latar belakang yang lain, akan tetapi konflik juga dapat muncul dalam internal agama dan latar belakang lainnya.

Persoalan-persoalan yang melahirkan konflik internal umat Islam dapat berupa perbedaan pandangan dalam memahami persoalan agama, perbedaan pemikiran, perbedaan ormas yang diikuti, perbedaan sikap dalam bidang sosial, bahkan perbedaan sikap dan pilihan politik juga menjadi akar konflik internal umat Islam. Sedangkan faktor eksternal yang memicu perbedaan seperti perbedaan keyakinan, perbedaan pemikiran, perbedaan budaya, dan perbedaan sikap. Adanya serbuan budaya luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam, derasnya luapan arus globalisasi dengan berbagai muatannya, juga menjadi persoalan yang membutuhkan solusi tersendiri. Persoalan-persoalan baik internal maupun eksternal tersebut jika tidak disikapi dengan arif, akan mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan intoleran bahkan radikal yang mengatasnamakan agama. Kasus di Indonesia misalnya, terjadinya kerusuhan Situbondo pada tahun 1996, konflik Poso¹³ pada tahun 1998, konflik Ambon pada tahun 1999, Tragedi Sampit yang

¹² Qodir, *Sosiologi Agama*, 77

¹³ Upaya damai di wilayah ini ditempuh oleh pemerintah dengan membuat Deklarasi Malino yang dilakukan di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Desember 2001 yang memuat 10 butir: 1). Menghentikan seluruh bentuk Konflik dan perselisihan; 2). Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi bagi siapa saja yang melanggar; 3). Meminta aparat Negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan; 4). Menjaga terciptanya suasana damai, menolak pemberlakuan darurat sipil, serta campur tangan pihak asing; 5). Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya

terjadi pada tahun 2001.¹⁴ Peristiwa yang tidak kalah pedih yang terjadi di wilayah Cikeusik,¹⁵ Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terjadi penyerbuan terhadap golongan Ahmadiyah yang menimbulkan jatuh korban.

Di kalangan pelajar sering terjadi peristiwa tawuran, pembullying, dan kelompok-kelompok lainnya yang menimbulkan instabilitas keamanan. Semua fenomena tersebut menimbulkan tanda tanya besar, ada apa dengan generasi muda penerus bangsa ini. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka orang akan melihat bahwa para pelaku tersebut identik dengan orang Islam. Seterusnya akan muncul persepsi bahwa Islam identik dengan kekerasan. Islam adalah agama perang. Islam adalah agama teroris. Islam sebuah agama yang mengajarkan sikap intoleran. Persepsi yang tidak terelakkan ini akan menyeruak di tengah-tengah masyarakat yang kurang baik dalam mengenal Islam. Agama Islam dengan muatan-muatannya seperti *rahmatan li al'alam*, agama penuh kasih sayang, agama penuh adab, mengajarkan disiplin, mengajarkan perdamaian, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persaudaraan dan persamaan, akan menjadi kontradiktif apabila dibenturkan dengan kondisi-kondisi yang memicu konflik di atas.

Dadang Kahmad menyatakan bahwa sejumlah fenomena konflik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dikategorikan menjadi tiga¹⁶ yakni: *pertama*, tuntunan pengakuan identitas etnis dalam wujud Negara merdeka

kerukunan hidup bersama; 6). Tanah di wilayah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga Negara memiliki hak untuk hidup, dating, dan tinggal secara damai yang menghormati adat istiadat setempat; 7). Semua hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung; 8). Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing; 9). Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh; 10). Menjalankan syariat agama bagi masing-masing pemeluknya berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menaati segala peraturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan dan ketentuan lainnya. Lihat Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2015), 88-89

¹⁴ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan antar Umat Beragama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 84-99

¹⁵ Peristiwa ini terjadi di kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang Banten. Jemaah Ahmadiyah yang dianggap sesat diserang oleh penduduk setempat (untuk lebih jelasnya lihat Tempo Interaktif Edisi Minggu, 6 Pebruari 2011)

¹⁶ Kahmad, *Multikulturalisme*, 12-13

(*ethnonationalism*) seperti yang diinginkan oleh Papua, Aceh dan Timor Leste. Yang disebut terakhir ini sudah berhasil memisahkan diri dari NKRI. *Kedua*, keinginan mempertahankan identitas etnis dan agama antar kelompok (konflik horizontal), seperti yang terjadi di Ambon, Poso, Sambas, Nusa Tenggara Timur, Lebak. *Ketiga*, perjuangan perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap eksplorasi sumber daya alam sekitarnya. Lebih lanjut Dadang Kahmad mengemukakan bahwa kategorisasi tersebut menginformasikan bahwa konflik etnis, ras dan antar golongan pada hakekatnya muncul dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga solusi dan sikap yang diambil terhadap konflik tersebut semestinya disesuaikan dengan konteks dan latar belakang sumbernya. Demikian juga konflik yang bercirikan ras, suku dan agama harus dipahami sebagai efek domino dari mismanagement dalam berbangsa dan bernegara.

Agama Islam datang tidak hanya bertujuan mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah agama, namun Islam juga mengakui keberadaan agama dan kepercayaan yang lain. Bahkan Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama yang lain. Perbedaan ini memberikan peluang kepada kaum muslim untuk menampilkan rasa kemanusiaannya yang luhur, dengan menggali dan mengembangkan perilaku saling memahami, saling mengisi, saling berlomba berbuat kebaikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Tumbuh suburnya sikap dan perilaku saling menghormati perbedaan ini dapat ditumbuhkan, dibina dan dipupuk melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan sedini mungkin, baik oleh keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Institusi Sekolah, keluarga maupun masyarakat, menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan yang mampu menebarkan benih-benih perilaku toleransi serta menyuburkannya. Penyadaran terhadap pentingnya memiliki sikap saling mengerti, saling menghargai, serta saling menghormati terhadap perbedaan, menjadi salah satu dasar utama dalam pembentukan sikap hidup bermasyarakat. Landasan-landasan tersebut dapat dipupuk melalui pembiasaan-pembiasaan di ketiga lingkungan pendidikan.

Pendidikan yang berlangsung di Indonesia khususnya lembaga Sekolah Menengah Atas memiliki peran yang urgen dalam menanamkan sikap toleransi beragama di kalangan siswanya. Pendidikan Agama merupakan salah satu materi yang wajib diberikan untuk semua jenjang pendidikan, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang bersumberkan al-Quran dan al-Hadits, diberikan kepada siswa yang beragama Islam. Mata pelajaran PAI yang diajarkan di Sekolah Menengah Atas ini memuat berbagai pengetahuan agama yang mampu memantapkan keimanan atau aqidah peserta didik, memperluas wawasan pengetahuan keagamaan dan keterampilan, serta membentuk perilaku mulia seperti bersikap toleran, memiliki sikap empati, mau berbagi dan perilaku-perilaku sholeh lain yang dianjurkan dan diwajibkan oleh agama Islam.

Pendidikan menjadi salah satu perpanjangan tangan dari pewarisan nilai-nilai luhur bangsa. Pendidikan adalah pewarisan budaya dari generasi pendahulu kepada generasi berikutnya. Budaya hidup rukun dan penuh toleransi dengan semboyan Negara Indonesia Bhineka Tunggal Ika telah melebur menjadi satu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia dengan kemajemukan masyarakatnya telah membuktikan dirinya menjadi negara besar yang mampu hidup damai di tengah-tengah heterogenitasnya.

Keberhasilan penanaman nilai-nilai luhur bangsa ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengakomodir kebutuhan setiap warga Negara yang heterogen. Keberagaman bangsa Indonesia yang penuh warna ini telah dijamin eksistensinya oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahkan kehidupan keberagaman dari semua lapisan warga Negara Indonesia juga mendapatkan jaminan yang sama.

Jaminan tersebut telah menghidupkan rasa aman dan tenteram rakyat Indonesia tanpa ada rasa kekhawatiran dan ketakutan dalam menjalankan agamanya. Masing-masing umat beragama memiliki kemerdekaan dalam mengekspresikan dan mewujudkan peribadatan agama yang dianut dan dipercayainya, tanpa merasa takut mendapatkan intimidasi dari pihak lain. Sebagai perwujudan dari keterjaminan untuk mengejawantahkan nilai-nilai

agama dan budaya yang dianut, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan, salah satu di dalamnya memuat pendidikan agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 Pasal 39 ayat (2), Pendidikan agama adalah salah satu dari tiga mata pelajaran yang wajib diberikan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.¹⁷ Selanjutnya dalam pasal penjelasan diuraikan juga bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional, dan merupakan salah satu hak peserta didik dan mendapat pendidikan agama.

Pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada semua peserta didik di setiap jenjang pendidikan formal mulai dari tingkat Sekolah Dasar dan yang sederajat hingga tingkat Perguruan Tinggi¹⁸. baik lembaga pendidikan milik Negara maupun milik swasta. Pendidikan Agama Islam adalah salah satu pendidikan agama yang diberikan kepada setiap peserta didik dari berbagai level tersebut. Penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berlangsung di sekolah-sekolah bukan hanya semata-mata memberikan pengetahuan tentang pengetahuan Agama Islam saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada seluruh peserta didik. Penanaman nilai-nilai agama ini menjadi hal utama, karena nilai-nilai yang dianut dan dipegang serta dipraktekkan oleh peserta didik akan menjadi identitas atau menjadi “merk” dari pribadi peserta didik.

Selanjutnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Bab V menyatakan:”Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan sesuai oleh pendidik yang beragama”.

¹⁷ Dua mata pelajaran lain yang wajib diberikan pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, selain pendidikan agama yakni pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

¹⁸ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Mulia, 2004), 37.

Pendidikan agama yang berlangsung di sekolah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut di atas, mestilah sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang mampu mengantarkan peserta didik pada terbinanya tiga aspek¹⁹: *pertama*, aspek keimanan mencakup seluruh rukun iman; *kedua*, aspek ibadah yang mencakup seluruh rukun Islam ; *ketiga* aspek akhlak, mencakup seluruh akhlak al-karimah.

Pendidikan menjadi tempat pewarisan budaya yang berlangsung bukan hanya di lembaga pendidikan formal, namun juga melalui pendidikan informal dan non formal. Pendidikan menjadi tempat manusia memperoleh pengetahuan, pendidikan menjadi tempat menempa manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari manusia tidak baik menjadi baik, manusia yang tidak pandai menjadi pandai.

Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten dikenal sebagai wilayah yang masyarakatnya cukup religius²⁰. Di wilayah ini lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti Pesantren baik pesantren modern maupun Salafi, serta Madrasah tumbuh dengan subur. Demikian juga lembaga pendidikan yang berciri agama selain Islam juga tumbuh dengan baik, meskipun tidak sebanyak lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam. Hal ini tentunya berbanding lurus dengan jumlah pemeluk agama yang terdapat di wilayah ini.

Menurut catatan Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Banten jumlah penduduk menurut agama dari 11.140.273 jiwa, beragama Islam 91,04 %, beragama Kristen 4,41 %, beragama Katholik 1,09 %, beragama Hindu 0,79 %, beragama Budha 2,65 %, dan beragama Konghucu 0,02 %.²¹ Dari sekian jumlah penduduk dan latar belakang agama yang berbeda-beda, maka berdasarkan UUD 1945 pasal 29 dan pasal 30 Negara (Pemerintah) menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran termasuk pengajaran agama.

¹⁹ Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, 38

²⁰ Salah satu indikasi kerelegiusan dimaksud, di wilayah ini tersebar lembaga pendidikan pesantren baik pesantren salafiah maupun pesantren modern. Pendidikan yang berlangsung di Pesantren ini memberikan warna betapa kentalnya nuansa pendidikan agama yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah ini. Pendidikan yang berlangsung di pesantren menjadi salah satu model pendidikan agama yang telah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka.

²¹ BPS Prov.Banten, *Banten dalam Angka*, data penduduk menurut agama, Tahun 2013,:

Religiusitas masyarakat Banten, dapat dilihat dari semangat masyarakat Banten memberikan pendidikan kepada anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan agama Islam yang berlangsung di pesantren-pesantren, maupun lembaga pendidikan Islam lainnya seperti Madrasah. Bahkan sebagai wujud dukungan pemerintah kepada masyarakat Banten khususnya kota Serang, pemerintah daerah kota Serang membuat payung hukum dengan mengeluarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Pendidikan Madrasah Diniyah yang wajib ditempuh oleh semua siswa Sekolah Dasar di Kota Serang.²²

Pendidikan agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits memiliki ajaran yang lemah lembut, penuh kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Tidak ada ajaran Islam yang menganjurkan pemeluknya berbuat kekerasan terhadap makhluk Allah yang lain. Islam menganjurkan pemeluknya untuk selalu berbuat adil, bahkan kepada musuh sekalipun, pemeluk Islam wajib berbuat adil.

Demikian idealnya ajaran yang berasal dari sumbernya. Ajaran ini hanya dapat ditanamkan dengan menebar benih melalui wadah pendidikan. Pendidikan akan mengembangkan peserta didiknya baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah-sekolah memiliki tujuan ideal yakni bukan hanya memberikan bekal pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan-keterampilan fisik dan non fisik. selama proses pembelajaran berlangsung akan terjadi internalisasi pengetahuan dan sikap yang dimiliki peserta didik.

Selama proses pendidikan yang telah berlangsung ternyata bukan hanya menghasilkan produk pendidikan yang idealis sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga dalam kehidupan yang nyata terjadi beberapa hal yang tidak sesuai dengan cita-cita luhur pendidikan Islam itu sendiri. Bahkan Kementerian Pendidikan nasional mengakui adanya pertumbuhan radikalisme di kalangan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)²³. Selain itu menurut sumber yang sama disinyalir pendidikan agama tidak hanya melahirkan sikap fanatik terhadap agamanya, tetapi juga menumbuhkan sikap radikalisme.

²² Lihat Peraturan Daerah Kota Serang 1/2010 dan Peraturan Wali Kota Serang nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kota Serang.

²³ Tempo Interaktif, Edisi Selasa, 12 April 2011

Jika diteliti lebih jauh, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian. Hal ini bukan hanya dalam normativitas teks wahyu dan sunnah Rasul sebagai sumber pendidikan Islam, melainkan juga telah termanifestasikan dalam sejarah Islam awal. Pesan moral Islam tidak menunjuk pada ajaran radikalisme baik dari sisi normatif maupun sisi historis kenabian.

Uraian dari latar belakang masalah tersebut menggugah kesadaran peneliti untuk menelusuri lebih dalam tentang perilaku toleransi beragama ini dengan melakukan penelitian disertasi yang berjudul: **“Perilaku Toleransi Beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas (Penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Serang, Banten)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada pencarian jawaban atas pertanyaan: “ Bagaimanakah perilaku toleransi beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 2 dan Sekolah Menengah Atas 4 Kota Serang, serta bagaimana mengajarkan perilaku toleransi beragama kepada siswa Sekolah Menengah Atas 2 dan Sekolah Menengah Atas 4 Kota Serang, agar lulusan lembaga pendidikan ini menjadi pribadi yang memiliki sikap toleran yang tinggi”.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profil Sekolah Menengah Atas Negeri 2 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Serang?
2. Apa Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang?
3. Nilai-nilai toleransi apa yang terkandung dalam Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang?
4. Bagaimana implementasi PAI dalam perilaku toleransi beragama di kalangan siswa SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang?
5. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi munculnya perilaku toleransi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kalangan siswa SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang?

6. Sejauhmana keberhasilan perilaku toleransi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kalangan Siswa SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

- a. Mengidentifikasi Profil Sekolah Menengah Atas Negeri 2 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Serang.
- b. Mengidentifikasi Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang
- c. Mengidentifikasi nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang
- d. Mengidentifikasi implementasi PAI dalam perilaku toleransi di kalangan siswa SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang?
- e. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku toleransi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kalangan siswa SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang?
- f. Mengidentifikasi keberhasilan perilaku toleransi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kalangan Siswa SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, baik kegunaan secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

- 1) Secara konseptual hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori baru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, baik untuk menentukan model pembelajaran maupun pengembangan materi Pendidikan Agama Islam yang harus disampaikan kepada para siswa Sekolah Menengah Atas. Materi-materi PAI yang diberikan kepada para siswa SMA dan

sederajat ini adalah materi yang mengajak pada pemahaman keagamaan yang egaliter, penuh toleransi namun menjadikan siswa tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam.

- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para peneliti lain yang ingin meneliti topik dan fokus yang lain, atau untuk membuat penelitian perbandingan dengan topik dan fokus yang sama, sehingga memperkaya khasanah keilmuan.

a. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan perilaku toleransi beragama melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas. Secara Praktis kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagi peserta didik, khususnya di siswa di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi untuk memperoleh hak-haknya sebagai peserta didik dalam memperoleh pendidikan agama Islam di sekolah yang penuh makna.
- a. Bagi para guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang khususnya, untuk menyampaikan materi PAI sesuai dengan kultur siswa. Menanamkan pemahaman keagamaan yang egaliter, penuh toleransi, hidup rukun, saling menghormati, sesuai dengan misi ajaran Islam yang *rahmatan li al'amin*.
 - b. Para pengelola Sekolah Menengah Atas, khususnya Kepala SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Kota Serang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dengan menyusun tata tertib sekolah yang mendukung terbentuknya perilaku toleransi beragama di kalangan para siswanya. Sekolah dapat memfasilitasi kebutuhan guru PAI

dalam menjalankan tugasnya selama proses pembelajaran PAI berlangsung untuk mengajarkan perilaku toleransi. Sekolah dapat memfasilitasi keberlangsungan pendidikan agama bagi siswa non Islam, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas.

- c. Bagi masyarakat, seperti komite pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu acuan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam bukan hanya teori semata, namun harus diimplementasikan dalam bentuk perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran PAI merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental, maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaannya.
- d. Bagi kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan penetapan kurikulum yang berkaitan dengan materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas khususnya dan sekolah level yang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini membahas tentang perilaku toleransi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas di Kota Serang. Peneliti mengambil tema penelitian ini karena mempertimbangkan pentingnya menggiatkan sikap toleransi di kalangan para siswa SMA di kota Serang. Selain itu penelitian yang membahas tema ini masih sangat terbatas, sehingga peneliti memandang perlu tema ini diangkat sebagai bahan penelitian disertai peneliti. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan toleransi dan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Adeng Muchtar Ghazali. 2011. "*Pendidikan Agama Islam Berwawasan Kerukunan Umat Beragama (Studi tentang Materi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Umum Negeri)*". Disertasi Prodi Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Bandung. Menurut hasil penelitiannya bahwa sejalan dengan doktrin Islam tentang kerukunan hidup beragama, maka perlu mengembangkan mata pelajaran PAI berwawasan kerukunan hidup beragama, karena pendidikan agama Islam harus beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan berorientasi ke depan. Karena memang praktik pendidikan harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, teori-teori pendidikan dan gilirannya berikutnya teori-teori pendidikan harus bersumber dari suatu pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. PAI berwawasan kerukunan beragama memiliki 3 orientasi yaitu: 1) orientasi diri melalui pemahaman para siswa; 2) orientasi sekolah melalui muatan kurikulum, silabi, dan materi ajar; 3) orientasi social, yaitu suasana lingkungan dimana para siswa dapat mengalami secara langsung kehidupan beragama. Disertasi ini menawarkan format materi kurikulum PAI Berwawasan Kerukunan Hidup Beragama untuk SMUN. Dan diharapkan dari hasil penelitian ini membantu para pemegang kebijakan dan pengelola pendidikan dalam mengembangkan kurikulum PAI berbasis multi agama dan multi kultural.
2. Lukman Hakim. 2011. "*Pengembangan Model Pendidikan Toleransi Antar Umat Beragama Melalui Pembelajaran Agama Islam (Studi kasus di SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya)*". Disertasi Prodi Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model pendidikan toleransi antar umat beragama yang dilaksanakan oleh SMAN 1 Kota Tasikmalaya adalah ekspositoris yang cenderung *teacher centered*. Guna meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, perlu dikembangkan Model *cooperative script* dalam pendidikan toleransi antar umat beragama melalui pembelajaran agama Islam. Tujuannya adalah agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, bersikap dan berperilaku toleransi antar umat beragama. Programnya berisi ajaran Islam tentang menghormati orang lain yang berbeda agama. Proses

pelaksanaannya diawali dengan pembuatan silabus, pembuatan RPP, pelaksanaan pembelajaran di kelas dan luar kelas dengan model *cooperative script*, dan melakukan evaluasi/penilaian dengan cara mengadakan pre tes dan post tes, dan penugasan. Secara teoritis hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa model ini dapat dijadikan model pembelajaran agama Islam yang berkualitas. Secara praktis, hasil penelitian ini berimplikasi bagi kemanfaatan guru agama Islam, Kepala Sekolah, dan siswa dalam mengembangkan model pendidikan toleransi antar umat beragama. Atas dasar itu, penelitian ini direkomendasikan untuk pihak-pihak pengelola SMAN 1 Kota Tasikmalaya, guru agama Islam, Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Tasikmalaya, masyarakat pendidikan dan pemuka agama.

3. Dodi S. Truna. 2011. "*Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural Telaah Kritis atas Muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum di Indonesia.*" Disertasi Prodi Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Temuan penelitian ini menjelaskan adanya kecenderungan yang berbeda di kalangan penulis buku ajar PAI di perguruan tinggi umum dalam merespon setiap tema multikulturalisme. Pandangan penulis pada tema-tema tentang aqidah dan hukum Islam pandangan mereka berbeda dengan perspektif multikulturalisme, sementara pada tema-tema lainnya, khususnya yang menyangkut hubungan antar manusia, banyak muncul dari wacana multikulturalisme sepanjang tulisan mereka adalah menyangkut tujuh persoalan: *Truth claim* (klaim kebenaran), *prejudice* (prasangka), *value judgement* (penilaian), *stereotype* (stereotip), diskriminasi, toleransi dan batas-batasnya, dan isu mayoritas-minoritas dalam kehidupan masyarakat.

4. H.Susar, 2012, *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme, (Studi di SMAN Kota Tangerang)*. Disertasi Prodi Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam kaitannya dengan kebermaknaan belajar pada mata pelajaran PAI dalam perspektif multikulturalisme di SMAN 8 yang mengarah pada ketercapaian kebermaknaan sinotik, etik, dan spiritual. Makna sinotik terkait dengan pengetahuan tentang diri yang merupakan kesadaran diri yang didasarkan pada keterhubungan pemahaman rasional dari hasil pembelajaran PAI mengenai hakekat manusia dalam konteks multikulturalisme yang dibuktikan dengan terinternalisasinya dimensi multikulturalisme dalam diri peserta didik. Adapun makna etik terkait dengan ekspresi moral, sistem nilai, dan berbagai tatanan yang dianut oleh peserta didik. Sedangkan makna spiritual terkait dengan pemahaman peserta didik bahwa perilaku sosial yang terkait dengan kompetensi multikultural peserta didik dipahami sebagai bagian dari keimanan kepada Allah SWT.

5. Rodani. 2015. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama di Sekolah (Studi Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Pada SMA Negeri dan Swasta di Provinsi Banten)*. Disertasi Prodi Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian dari disertasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari SMA di Provinsi Banten, belum mengimplementasikan kebijakan pendidikan agama secara menyeluruh. Dari 20 sekolah yang dijadikan sampel, baru 6 sekolah atau sebagian kecil yang dapat menyediakan guru dan ruang kelas untuk belajar agama non Islam, dan menggunakan kurikulum sesuai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang berlaku. Menurut Rodani, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, peraturan Menteri Agama tentang Pelaksanaan pembelajaran agama di sekolah, belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga kebijakan pendidikan agama pada SMA di Provinsi Banten belum diimplementasikan dengan baik. Selain belum tersosialisasikan dengan baik, kendala lain yang dihadapi sekolah yaitu kurangnya fasilitas dan guru agama tertentu, sehingga banyak siswa yang tidak diajar pendidikan agama di sekolah. Solusi yang ditawarkan dalam menghadapi kasus tersebut ialah: *Pertama*, Meningkatkan sosialisasi ulang secara merata kepada sekolah-sekolah agar

sekolah dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan menjunjung nilai-nilai toleransi. *Kedua*, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah memberikan dukungan baik sarana prasarana pembelajaran maupun tenaga pendidik/ guru agama yang dibutuhkan. *Ketiga*, Pihak sekolah dapat mengatur pelaksanaan pembelajaran agama dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti pelajaran lain.

6. Tedi Priatna. 2015. “*Model Pendidikan Agama Islam di Sekolah Berwawasan Kebangsaan (Studi kasus di Sekolah Menengah Atas Terpadu Krida Nusantara Kota Bandung)*.” Disertasi Prodi Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembelajaran PAI di SMAT Krida Nusantara, baik pada jam pelajaran di kelas, maupun di luar kelas merupakan implementasi kurikulum nasional dan muatan local yang terprogram. Pembelajaran di luar kelas bukan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat pilihan dan tambahan, tapi merupakan keharusan dan tuntutan kurikulum. (2) focus dari model pembelajaran PAI di SMAT Krida Nusantara adalah membiasakan dan membentuk akhlak mulia. Oleh karenanya system social dan suasana pembelajaran dibangun melalui pembiasaan-pembiasaan. Sintaks model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung dan pembelajaran kooperatif. Selain visi dan misi yang memposisikan pendidikan agama sebagai salah satu pilar pendidikan, kemampuan guru yang baik, faktor pendukung yang tak kalah penting adalah ketersediaan saran prasarana. (3) Di sekolah berwawasan kebangsaan SMAT Krida Nusantara, penerapan model pembelajaran PAI diintegrasikan dengan system terpadu boarding school dan sekolah wiyata mandala melalui budaya disiplin sebagai karakter utama budaya sekolah.

7. Eti Tismawati. 2015. “*Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Keberagaman Siswa melalui Cooperative Learning (Analisis terhadap Model Cooperative Learning di SMAN 1 Tasikmalaya)*.” Disertasi Prodi Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Melalui hasil penelitiannya diperoleh 1) Lingkungan SMAN 1 Kota Tasikmalaya memiliki karakter khusus untuk mengimplementasikan nilai keberagaman melalui prose pembiasaan. Penanaman nilai-nilai Islam sebagai bagian penting dari upaya yang “memaksa” telah melahirkan habituasi dalam pembentukan karakter peserta didik. 2) Perencanaan kurikulum mampu membentuk karakter peserta didik agar ramah terhadap genus local kebangsaan Indonesia. 3) pola relasi sub pokok bahasan dalam mata pelajaran PAI dapat dikaitkan dalam fiqih seperti pembagian waris dan zakat; fitrah dan mal direlasikan dengan pelajaran Matematika. 4) Sistem manajemen sekolah lebih menekankan pada prinsip manajemen terbuka. Prinsip manajemen ini diwujudkan melalui berbagai upaya kesejajaran dalam membentuk watak dasar pendidikan demokratis di lingkungan sekolah, dan 5) Kompetensi guru PAI: *Pertama*, agen perubahan. *Kedua*, sifat pemberani. *Ketiga*, mempercayai orang lain. *Keempat*, bertindak atas dasar system nilai. *Kelima*, meningkatkan kemampuannya secara terus menerus sepanjang hayatnya. *Keenam*, visioner dalam menghadapi situasi yang rumit. Penelitian ini menghasilkan sebuah teori bahwa keberhasilan pendidikan dalam berbagai jenis dan jalur akan diukur oleh keberhasilannya dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang akan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pendidikan. Karena itu, lembaga pendidikan apapun, yang ingin berhasil seperti terjadi di SMAN 1 Kota Tasikmalaya, harusnya menempatkan agama (Islam) sebagai way of life dalam seluruh tata system pembelajaran. Dan jika yang demikian mampu dilakukan, maka setiap satuan pendidikan berarti telah berdiri dalam posisinya sebagai penjamin keberhasilan pendidikan secara nasional.

8. Deden Syarif Hidayatulloh. 2016. *”Pembentukan Perilaku Toleransi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (Penelitian di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Telkom).”* Disertasi Prodi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan (1) PAI di ITB dan Tel-U mempunyai posisi strategis terhadap pembentukan perilaku toleran, sumber nilai dan pedoman (2) kebijakan PAI dalam membentuk perilaku toleransi didasari lemahnya

memahami perilaku toleran, adanya konflik, menentukan kesadaran, cara pandang, bersikap terhadap realitas keberagaman; (3) Implementasi kebijakan PAI dalam membentuk perilaku toleransi beragama melalui proses KBM, pembiasaan, peneladanan, pemotivasian, penegakan aturan, diintegrasikan ke ekstrakurikuler; (4) Evaluasi dilaksanakan secara kontinu melalui UTS, UAS, tugas dan mentoring; (5) Faktor pendukung pemerintah, institusi, manajemen pengelolaan, penegakan aturan, dosen, kurikulum, program, sarana prasarana, dan faktor penghambat jumlah dosen, mahasiswa kurang berminat, terbatas waktu KBM, ketersediaan buku; (6) Problem yang dihadapi dalam implementasi PAI, Islam dikaji sebagai objek ilmu saja, tidak mempunyai strategi penyusunan dan pemilihan materi, kurangnya penjelasan dan penguasaan materi ajar, metode dari *teacher centered* ke *student centered*, PAI lebih beerorientasi kognitif, rendahnya moral dan budaya baca; (7) Tingkat keberhasilan kebijakan PAI dalam membentuk perilaku toleransi beragama dilihat dari terbangunnya pemahaman, praktik dan dialog keagamaan, menghargai, menghormati, kerjasama, dan hidup rukun. Dari hasil penelitian tersebut penulis berharap *Teaching Model* dikembangkan untuk membentuk perilaku toleransi beragama mahasiswa melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang telah ada berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan tersebut dilihat dari sisi lokasi penelitian dan fokus masalah penelitian. Penelitian secara khusus yang membahas tentang "Perilaku toleransi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas" (Penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Serang" belum dilakukan. Sehingga penulis memandang perlu dilakukan penelitian tentang masalah ini

E. Kerangka Pemikiran

Kata toleransi dalam bahasa Inggris "*tolerance*" memiliki persamaan arti kata dengan *tasamuh* bahasa Arab menjadi kata yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Kajian tentang toleransi telah banyak dibahas oleh para peneliti.

*Tolerance means the willingness to accept or tolerate, especially opinions or behavior that you may not agree with, or people who are not like you*²⁴ (Toleransi adalah kesediaan untuk menerima atau toleransi, khususnya pemikiran-pemikiran atau tingkah laku yang engkau mungkin tidak setuju dengannya atau orang yang tidak sama denganmu)

Kata toleransi dapat diartikan sebagai:” *a fair, objective and permissive attitude toward whose opinions, practices, race, religion, nationality, etc, differ from one’s own, freedom from bigotry*” (sikap adil, objektif dan permissive terhadap orang-orang yang berpendapat, melakukan sesuatu, ras, agama, dan kebangsaan mereka yang berbeda dari dirinya sendiri; bebas dari kefanatikan).

Dalam pengertian yang lain, toleransi diartikan sebagai:” *a fair, objective, and permissive attitude towards opinions and practices that differ from one’s own*”²⁵(Sikap adil, jujur objektif dan permisif terhadap pendapat dan praktik yang berbeda dari miliknya sendiri).

Kata toleransi memiliki padanan kata dalam bahasa Arab *Tasamuh* yaitu adanya saling memahami antara masyarakat muslim dan masyarakat nonmuslim yang bertujuan memelihara kerukunan hidup dan kerjasama yang baik dalam masyarakat. *Tasamuh* berfungsi sebagai penertib, pengaman, pendamai, dan pemersatu dalam komunikasi dan interaksi sehingga terpelihara kelestarian lingkungan hidup dan terwujudnya hubungan baik antara sesama anggota masyarakat.

Dari pengertian tersebut dapat diambil makna bahwa toleransi atau *tasamuh* ialah tersedianya rasa saling memahami perbedaan baik itu perbedaan pemikiran, sikap, kebiasaan, keadaan yang berbeda dengan dirinya. Perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi suatu hal yang harus dipertentangkan, tetapi untuk dimaklumi. Toleransi atau Rasa penerimaan ini menurut Zainuddin Ali lebih

²⁴ A S Hornby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*,(Oxford: Oxford University Press,2003), 1423

²⁵ *The Random House Of Dictionary of the English Language*, Edisi kedua (New York: Random Hpuse, Inc, 1987), 1992

terfokus pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan, bukan pada masalah aqidah/ keimanan.²⁶

Rasa tasamuh terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan menjadi keniscayaan, karena ajaran Islam itu sendiri menganjurkan pemeluknya menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk Allah, meskipun berbeda agama dan keyakinan. Islam memiliki ajaran yang berbeda dengan agama lain di satu sisi dan memiliki persamaan dengan agama yang lain di sisi yang lain. Harun Nasution menyatakan ajaran Islam memiliki ajaran dasar berupa aqidah/ keimanan serta ibadahnya yang tidak dapat berubah sampai kapanpun; serta ajaran bukan dasar yang dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.²⁷ Ajaran dasar yang tidak dapat berubah akan melahirkan sikap toleransi bagimu agamamu dan bagiku agamaku, sedangkan ajaran bukan dasar yang dapat berubah akan melahirkan sikap toleransi dengan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan. Karena disinilah bagaimana rasa kemanusiaan itu diuji.

Penanaman perilaku toleransi yang dilakukan melalui proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebagai wujud pengamalan salah satu ayat:” *Hai manusia , sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”²⁸

Kemajemukan manusia sebagaimana dalam surat al-Hujurat tersebut telah dimiliki masyarakat Indonesia yang memang plural. Pendidikan agama yang diberikan di lembaga-lembaga pendidikan memiliki tujuan mengisi otak (*knowledge*), mengisi hati (*value*), mengisi tangan (psikomotor) peserta didik, sehingga seseorang bertindak dan berperilaku sesuai dengan tuntunan agama.²⁹

²⁶ Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2015),56-57

²⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jilid I,(Jakarta: UI Press, 1988),

²⁸ QS. Al-Hujurat: 13

²⁹ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Mulia, 2004), 164

Toleransi dan kerukunan dalam pandangan umat Islam Indonesia antara lain tercermin dalam sikap Majelis Ulama Indonesia dalam Keputusan Komisi A Ijtima' Ulama MUI III se-Indonesia di Padang Panjang tanggal 26 Juni 2009 tentang *Masail Asasiyah Wathaniyah* (Masalah Strategi Kebangsaan) mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam tentang Hubungan Antarumat Beragama antara lain menyebutkan sebagai berikut:

1. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, di mana kesepakatan ini mengikat seluruh elemen bangsa.
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dalam hal suku, ras, budaya maupun agama. Karenanya bangsa Indonesia sepakat untuk tetap satu dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*.
3. Umat Islam sebagai bagian tersebar dari bangsa Indonesia harus terus menjaga konsensus nasional tersebut.
4. Dalam hal kemajemukan agama, negara mengakui eksistensi beberapa agama, dimana masing-masing agama tersebut mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara. Negara menjamin warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.
5. Islam mengakui eksistensi agama alain tanpa mengakui kebenaran ajaran tersebut, sebagaimana pada masa Nabi juga diakui eksistensi agama selain Islam, antara lain Yahudi, Nasrani dan Majusi.
6. Dalam kontek berbangsa dan bernegara, setelah proklamasi 1945 Islam memandang posisi umat beragama sebagai sesama bagian warga bangsa yang terikat oleh komitmen kebangsaan sehingga harus hidup berdampingan secara damai dengan prinsip *mu'ahadah* atau *muwatsaqah*, bukan posisi *muqatalah* atau *muharabah*.

7. Dalam rangka menghindarkan adanya konflik antar pemeluk agama di Indonesia, negara wajib menjamin warganya untuk menjalankan agamanya dan melindungi kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dari setiap upaya penodaan agama.
8. Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi yang melakukan penodaan agama, baik secara terang-terangan, maupun tersembunyi, maka negara harus menindaknya secara tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Pendidikan agama dipandang memiliki peran sangat penting untuk menumbuhkan embrio rasa tasamuh. Keberlangsungan pendidikan agama telah dilakukan semenjak Indonesia mencapai kemerdekaan. Upaya-upaya untuk melaksanakan pendidikan agama di sekolah umum telah dimulai sejak adanya usul Badan Penyidik Komite Nasional Indonesia Pusat, diantara usul badan tersebut ditujukan kepada kementerian pendidikan pengajaran dan kebudayaan adalah termasuk pengajaran agama, madrasah dan pesantren. Usul yang dimaksud sebagai berikut:

“Pengajaran agama hendaklah mendapat tempat yang teratur seksama hingga cukup , mendapat perhatian yang semestinya, dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipilihnya. Tentang cara melaksanakan ini baiknya kementerian mengadakan perundingan dengan badan pekerja. Madrasah dan pesantren-pesantren yang ada pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.³¹ Perkembangan pendidikan agama di Indonesia setidaknya telah melewati tiga fase. *Pertama*, fase tahun 1946-1965. Pada masa ini pendidikan agama masih mencari bentuk dan format. Pada fase ini terkesan

³⁰. Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009*, 5

³¹Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Mulia, 2004), 168

pendidikan agama belum dianggap penting. *Kedua*, fase ini berlangsung antara tahun 1966-1989. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada fase ini pendidikan agama justru dianggap memiliki peran yang sangat penting karena pada tahun 1965 telah terjadi pemberontakan G.30 S. PKI. Sidang Umum MPRS tahun 1966 No. XXVII/MPRS/1966

Dari ketentuan-ketentuan tersebut tampak jelas bahwa pendidikan agama di sekolah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan agama siswa, sesuai dengan falsafah Negara Pancasila, dengan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Karena itu, pendidikan agama di sekolah bukanlah pendidikan perbandingan agama, karena hal itu hanya dilakukan dalam masyarakat sekuler, melainkan pendidikan untuk membimbing siswa agar menjadi pemeluk agama yang baik. Selain itu, pendidikan agama juga dimaksudkan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang menghormati pemeluk dan agama yang berbeda serta bertanggung jawab bagi terpeliharanya kerukunan antar umat beragama, dan agar tidak terjadi kerancuan dalam beragama. Karena itu pula, pendekatan pendidikan agama di sekolah dalam perspektif filsafat Pancasila tidaklah tepat kalau menggunakan pendekatan doktrinal (*ecclesiastical approach*) atau pendekatan ilmu sosial murni (*sosial-studies approach*) melainkan pendekatan *sosial planning approach*.

Untuk menyampaikan pendidikan agama, sedikitnya terdapat tiga pendekatan ³² yang dapat dipertimbangkan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah. *Pertama*, pendekatan doktrinal (*doctrinal* atau *ecclesiastical approach*). Pendekatan ini cenderung lebih mengajarkan (mentransfer) nilai dan norma ajaran agamanya sendiri. Atas keyakinannya terhadap kebenaran absolut agama sendiri, pendekatan ini “mengindoktrinasi” bahwa hanya ajaran agama yang dipeluknya itulah agama yang benar. Agama yang dipeluk orang lain adalah salah, dan harus dibasmi.

³² M, Atho Mudzhar dalam Marwan Sarijo, *Mereka Bicara Pendidikan Islam Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 101-102

Kedua, pendekatan studi ilmu sosial murni (*sosial-studies approach*). Pendekatan ini mempraktikkan pendidikan agama dengan pendekatan ilmu sosial. Menurut pendekatan ini, pendidikan agama adalah bagian dari ilmu sosial. Pendidikan agama diajarkan seperti mengajarkan ilmu-ilmu lain yang diorientasikan memberikan pemahaman tentang konsep norma dan nilai agama serta fungsinya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Ketiga, pendekatan perencanaan sosial (*sosial planning approach*). Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan agama di negeri kita, kiranya pendekatan perencanaan sosial inilah yang dapat dianggap paling tepat untuk diterapkan. Pendekatan ini dapat diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat dalam rangka penataan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depannya. Penerapan pendekatan ini diharapkan dapat mendorong siswa (peserta didik) untuk meresapi, menghayati, dan mengamalkan ajaran atau materi agama yang dipeluknya dan dalam waktu yang sama mengembangkan nilai-nilai multikultural, seperti: menghormati, menghargai, dan toleran dengan pemeluk dan ajaran agama lain. Bangsa Indonesia, dengan segenap ciri kemajemukannya, tampak cocok atau tepat mengembangkan pendekatan perencanaan sosial ini dalam merealisasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan agama.

Pendidikan menjadi kata yang sangat penting manakala dihubungkan dengan kualitas manusia. Melalui pendidikan manusia dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik. Pendidikan memberikan manusia mendapatkan penyadaran, pencerahan, pemberdayaan dan perubahan tingkah laku.³³

Pendidikan juga membentuk kesadaran dan kepribadian peserta didik selain transfer ilmu dan keahlian. Proses pendidikan yang berlangsung seperti tersebut dapat difungsikan sebagai sarana pewarisan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi penerusnya.³⁴ Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin),

³³ Nurani Siyomukti, *Teori-Teori Pendidikan dari Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015),21

³⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*,(Jakarta: Kencana , 2014),5

pikiran (intelekt) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.³⁵

Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menyatakan, Pendidikan ialah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari rumusan Undang-Undang tersebut sangat jelas bahwa proses pembelajaran yang berlangsung merupakan bagian penting dari pendidikan. Proses pembelajaran merupakan tahapan yang dilalui oleh setiap peserta didik dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga kualitas pendidikan dapat ditentukan oleh bagaimana proses itu berlangsung.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berlangsung di Sekolah Menengah Atas, memiliki andil untuk mengisi dan menguatkan spiritualitas peserta didik, memperbaiki akhlak, selain juga menunjang tujuan pendidikan yang lain sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang di atas. Sejalan dengan misi agama Islam yang *rahmatan lil' alamin*, pembelajaran PAI di SMA di kota Serang, diharapkan mampu mewujudkan misi tersebut dengan mencetak para siswa yang memiliki akhlakul karimah termasuk perilaku toleransi di dalamnya.

Pendidikan Agama Islam untuk sekolah memiliki fungsi sebagai *Pengembangan*, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Swt yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga; *Penanaman nilai*, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat; *Penyesuaian Mental*, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuyai dengan ajaran agama Islam; *Perbaikan*, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran

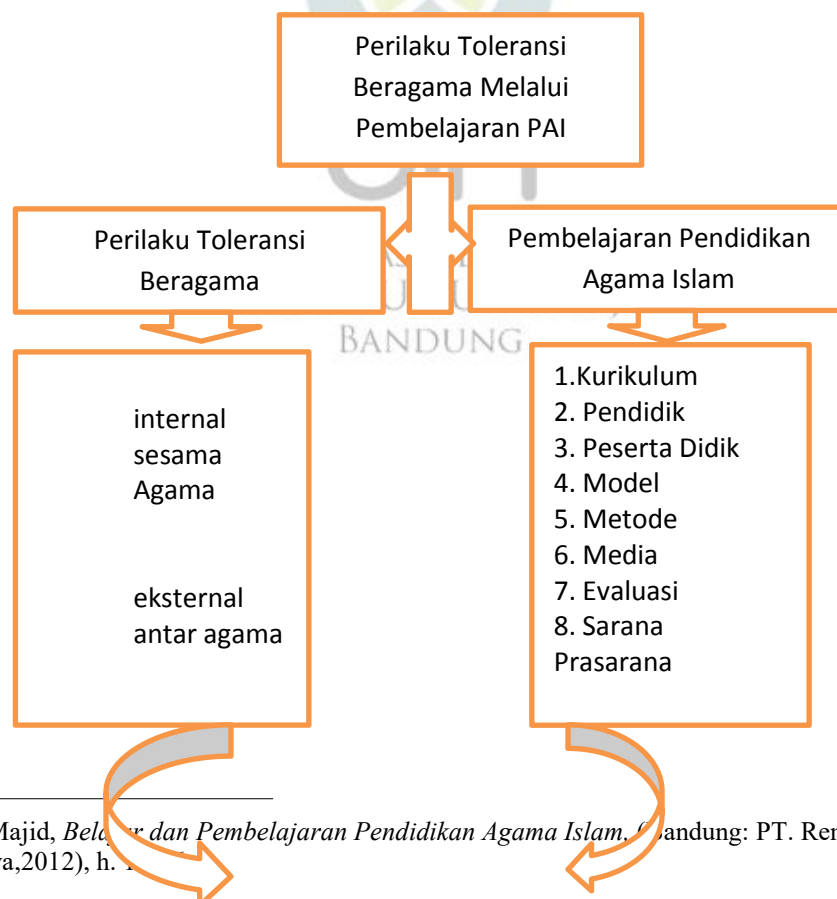
³⁵ Ki Hajar Dewantara, *Masalah Kebudayaan: Kenang-Kenangan Doktor Honoris Causa* (Yogyakarta, 1967), 42

dalam kehidupan sehari-hari; *Pencegahan*, yaitu untuk menangkal hal-hal negative dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya; *Pengajaran*, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nirnyata), system dan fungsionalnya; *Penyaluran*, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.³⁶

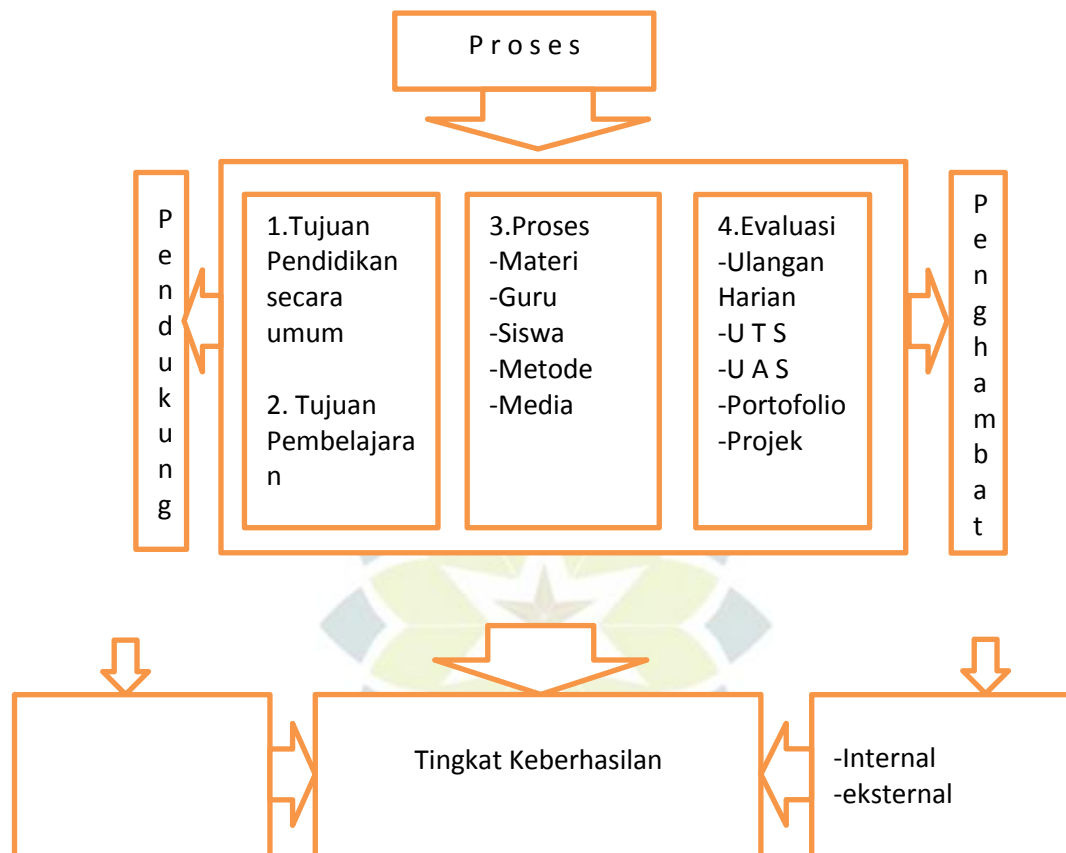
Visualisasi kerangka pemikiran tentang perilaku toleransi beragama di Sekolah Menengah Atas sebagai berikut:

**Perilaku Toleransi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Di Sekolah Menengah Atas
(Studi Kasus Di Sma Negeri 2 Kota Serang, Sma Negeri 3 Kota Serang, Sma
Negeri 4 Kota Serang Dan Sma Negeri 5 Kota Serang)**

Tabel 1.1



³⁶ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 1



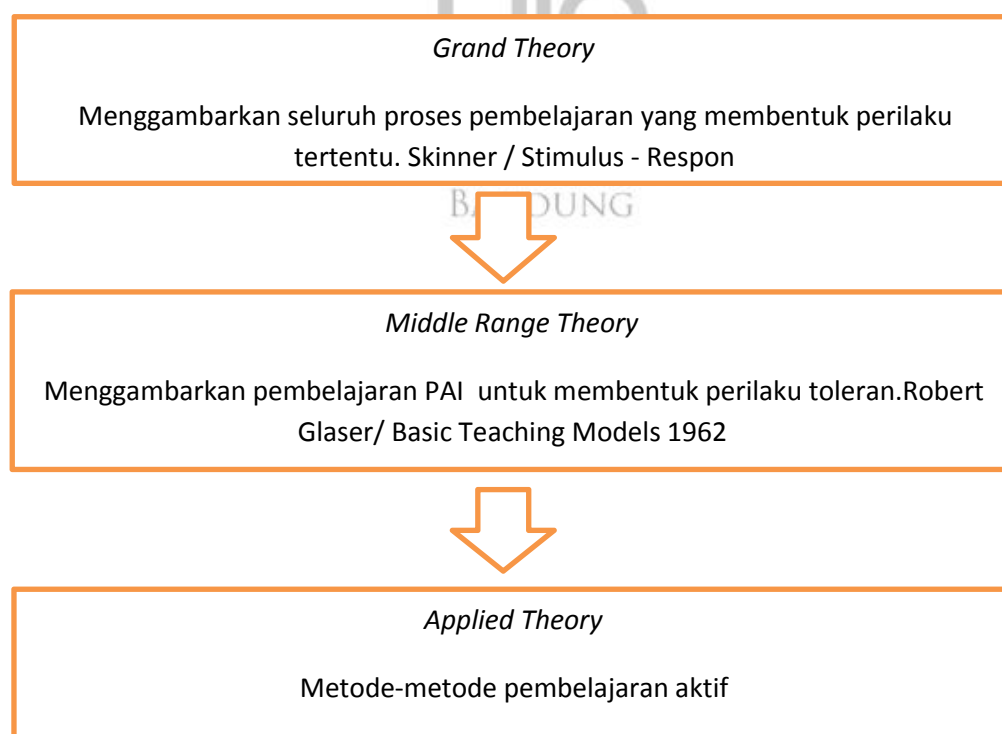
Pembelajaran PAI di SMA mengajarkan tentang perilaku toleransi beragama. Perilaku Toleransi beragama yang terdapat di kalangan siswa SMA dapat berupa toleransi internal sesama agama dan toleransi eksternal antar agama. Perilaku toleransi internal agama, terkait dengan saling menghormati perbedaan mazhab, perbedaan kebiasaan dan perbedaan-perbedaan dalam hal-hal khilafiah. Sedangkan perilaku toleransi ekstrenal agama meliputi, saling menghargai dan mengormati keyakinan dan agama yang berbeda, tidak melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun tutur kata.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berlangsung di SMA memiliki faktor-faktor seperti kurikulum Kurikulum, Pendidik, Peserta Didik, Model, Strategi, Media, Evaluasi, Sarana Prasarana. Semua faktor tersebut memiliki peran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik tujuan tersebut berupa tujuan umum maupun tujuan khusus.

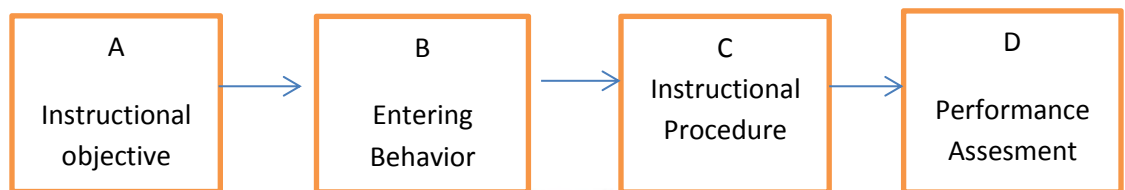
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pembahasan. Untuk perilaku akan digunakan teori perilaku behaviorisme, sedangkan dalam pembahasan pembelajaran akan digunakan teori-teori yang berhubungan dengan pembelajaran. Bagan berikut akan menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, perilaku toleransi beragama dalam pembelajaran PAI di kalangan siswa SMA dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, perilaku toleransi beragama terhadap sesama agama (internal) ;kedua, perilaku toleransi beragama dengan agama yang berbeda (eksternal).

Penelitian ini menggunakan beberapa teori. Sesuai dengan pembahasan penelitian tentang perilaku toleransi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, teori utama atau *Grand Theory* yang digunakan adalah teori-teori tentang behaviorisme, kemudian pada tataran teori antara atau *Middle Range Theory*, penelitian ini menggunakan teori-teori tentang model pembelajaran, sedangkan pada tataran teori terapan atau *Applied Theory* digunakan metode-metode pembelajaran aktif



Model pembelajaran dasar yang digunakan dalam penelitian ini ialah
Basic teaching model dari Glaser



Menurut Glaser langkah pertama dan terpenting dalam membuat lesson plan ialah merumuskan tujuan (*instructional objectives*). Di sini instruksi berarti pengajaran. Tujuan pengajaran itu tidak boleh menyimpang dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Tujuan pengajaran yang dimaksud dalam model ini ialah suatu pola tingkah laku yang khusus yang diharapkan dimiliki murid setelah proses pengajaran selesai. Tujuan inilah yang dimaksud dengan tujuan instruksional khusus (TIK).

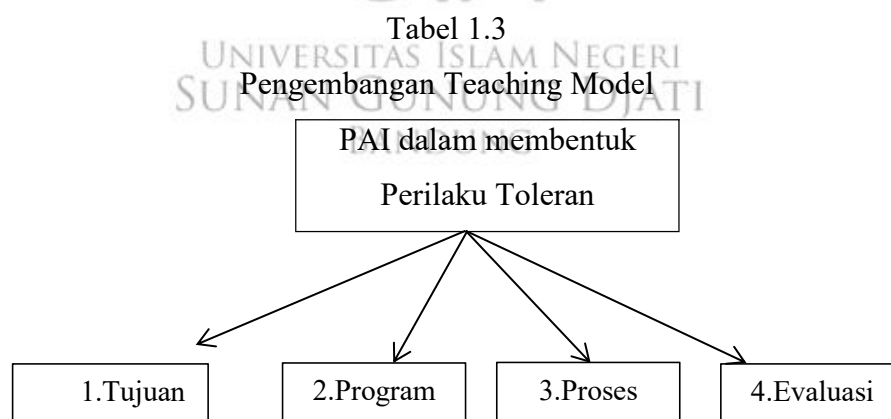
Langkah kedua ialah meneliti keadaan kesiapan murid sebelum proses pengajaran dimulai. Kegiatan ini disebut oleh Glaser dengan *entering behavior*. Pada langkah ini, kegiatan guru bukan saja meneliti kesiapan murid belajar, melainkan juga usaha membangkitkan minat memasuki proses belajar-mengajar yang akan dilakukan. Ada beberapa teknik dalam membangkitkan minat. Biasanya yang paling banyak dilakukan pada langkah kedua ini ialah kegiatan pretest. Pretest memang salah satu bentuk kegiatan dalam meneliti kesiapan murid, dan juga kadang-kadang dapat sekaligus membangkitkan minat belajar para murid.

Langkah ketiga ialah menentukan langkah-langkah mengajar (*instructional procedure*). Inilah bagian utama dalam kegiatan belajar-mengajar tersebut. Pada langkah ini guru memiliki peran bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Satu sisi guru dibatasi oleh waktu dalam menyampaikan materi, di sisi yang lain guru harus mampu memahami

materi kepada siswa dalam waktu yang telah ditentukan. Selama berlangsungnya proses pembelajaran ini seorang guru harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, materi, waktu yang tersedia serta kapan pembelajaran berlangsung, suasana lingkungan, dan media yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Untuk mewujudkan tercapainya langkah pembelajaran dengan baik, guru dituntut memiliki kompetensi profesional serta kompetensi-kompetensi yang lain.

Langkah terakhir ialah mengadakan evaluasi yang biasanya disebut dengan *post test*, artinya tes yang dilakukan setelah selesai proses pembelajaran. Kegunaan *post test* bukan saja untuk mengetahui berapa persen tujuan pengajaran dapat dicapai, melainkan juga berguna sebagai bahan masukan yang penting untuk menyempurnakan *lesson plan* tersebut, dengan perkataan lain *post-test* berguna sebagai umpan balik (*feedback*).

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengambil model Glaser, yaitu *Teaching Model* untuk mengembangkan konseptual pendidikan agama Islam dalam membentuk perilaku toleransi, model ini sederhana dan memudahkan untuk mengembangkan varian-varian model yang berbeda kedepannya. Dan model ini dijabarkan dalam diagram di bawah ini:³⁷



Tujuan merupakan kristalisasi nilai-nilai yang memiliki fungsi dalam mengarahkan sekaligus memberi makna pada program yang akan dijalankan serta proses berikutnya. Nilai yang terkandung dalam tujuan pembelajaran bermuatan

³⁷ Aan Hasanah, Pendidikan Karakter Berspektif Islam, (Bandung: Insan Komunika, 2013), 117

dimensi keislaman dan keindonesiaan, serta tujuan praktis pembelajaran. Jadi tujuan pendidikan toleransi berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan ruang lingkup pendidikan dan dinamikanya.

Program merupakan rancangan yang terencana dan terukur yang dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditentukan. Program akan menentukan kualitas ketercapaian pendidikan. Kalau programnya tepat sesuai dengan tujuan, maka program itu dapat dijalankan dengan baik pula.

Proses dalam pendidikan memiliki makna yang strategis, karena tujuan dan program yang baik, belum tentu baik kalau prosesnya tidak tepat. Proses adalah suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja program yang telah dirancang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Evaluasi sangat penting dalam proses pendidikan, karena tujuan evaluasi pendidikan bukan hanya untuk mengukur keberhasilan program pendidikan, tetapi juga sebagai langkah korektif untuk terus memperbaiki dan mengembangkan pendidikan kearah yang lebih baik. Hasil evaluasi dapat digunakan oleh guru-guru untuk menilai keefektifan pengalaman pembelajaran, kegiatan-kegiatan belajar dan metode-metode pembelajaran yang digunakan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG